# PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

## Pengantar

Di dalam kehidupan akademik perguruan tinggi, perpustakaan merupakan salah satu fasilitas pendukung utamanya. Perpustakaan akan berperan bukan hanya sebagai pusat informasi yang diperlukan oleh masyarakat akademik perguruan tinggi, tetapi juga merupakan pusat dokumentasi karya-karya akademik warga perguruan tinggi sehingga secara keseluruhan perguruan tinggi yang bersangkutan di akui keberadaannya oleh masyarakat luas.

Di Indonesia, peran perpustakaan perguruan tinggi yang sangat penting tersebut ditunjukkan dengan kedudukan pustakawan sebagai tenaga kependidikan di dalam sistem pendidikan nasional dengan hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya (UU No. 2/1989 Ps. 25 ayat (2)). Di dalam pendidikan pendidikan tinggi kedudukan pustakawan di sebutkan sebagai tenaga fungsional penunjang akademik (PP No. 60/1999 Ps. 107). Demikian pula perpustakaan sebagai salah satu syarat penyelenggaraan program studi maupun kelembagaannya telah ditegaskan dalam Kep Mendikbud No. 222/U/1998. Namun demikian karena berbagai sebab rupanya kedudukan yang sepadan bagi perpustakaan dan pustakawannya ternyata masih jauh berada dari nilai kesepadanan yang seharusnya.

Sebagai suatu pengantar diskusi, tulisan ini mengetengahkan berbagai kemungkinan bentuk perpustakaan, cakupan fungsionalnya dan cara pengelolaannya sebagai suatu pelaku jasa layanan pendidikan tinggi untuk jangka waktu 5-10 yang akan datang, terutama dalam kaitannya dengan gobalisasi pendidikan tinggi.

**Globalisasi Ditinjau dari Gatra Pendidikan Tinggi**

Dalam mengupas tentang berbagai implikasi dari globalisasi terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi McGinn (1995)[1], mengemukakan fenomena 5 bentuk aliran (*flow*) berikut:

1. penduduk bergerak/berpindah melintasi batas nasional;
2. aliran informasi, dalam bentuk data laporan ilmiah, berita, statistik, film dokumenter dan video;
3. aliran teknologi baru komunikasi, produksi, pengagihan, yang memungkinkan terjadinya perubahan secara radikal dalam organisasi dan baku kehidupan serta agihan kesejahteraan;
4. aliran modal, yang dalam volume harian dapat melebihi produk nasional total kebanyakan negara dan di luar kemampuan kendali pemerintah; dan
5. aliran citra dan gagasan, dalam bentuk buku, majalah, program televisi, video, musik dan film.

Appadurai[2] menyebutkan kelima bentuk aliran tersebut sebagai matra (*dimensi-ons*) dari aliran kebudayaan: *etnoscapes, mediascapes, technoscapes, finance-scapes,* dan *ideoscapes.*

Wujud elemen-elemen aliran fenomena globalisasi tersebut dalam dunia pendidikan tinggi dapat mendorong ke arah jenis program, substansi program, tatacara dan/atau institusi penyelenggaraan yang bersifat global. Aliran manusia yang bersifat global di dalam pendidikan tinggi dapat berupa aliran tenaga pengajar, peneliti, dan mahasiswa. Aliran manusia, sivitas akademika perguruan tinggi, selalu mengkait dengan aliran dana (modal), informasi, citra maupun gagasan. Dana beasiswa yang dialokasikan oleh pemerintah kepada para mahasiswa luar negeri yang akan belajar di Indonesia sekitar 5% dari seluruh beasiswa yang dianggarkan. Sebagai contoh hal ini adalah beasiswa untuk

---

[1] McGinn, N.F. 1995. The Implication of Globalisation for Higher Education. Dalam *Learning from Experiece: Policy and Practice in aid to Higher Education, L. Buchert and K. King, eds.* CESO Paperback No. 24. Hal. 77-92.

mahasiswa: GNB (sudah hampir selesai), SEARCA, Kamboja (mulai tahun 2000), dan yang terakhir pertukaran mahasiswa RRC. Mahasiswa asing yang datang belajar di perguruan tinggi di Indonesia dengan beasiswa sponsor atau biaya sendiri setiap tahun semakin bertambah. Puluhan pakar, peneliti dari berbagai negara asing, misalnya: pakar Jepang lewat program JICA, JSPS, pakar Jerman lewat program yang disponsori DAAD/GTZ, pakar Belanda dan juga pakar-pakar dari berbagai negara Eropa dan Amerika setiap tahun datang dan pergi.

Pemerintah Jepang sendiri dalam tahun 2000 telah mengundang 100.000 mahasiswa internasional untuk belajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi Jepang, di mana 90% di antara mahasiswa-mahasiswa yang diberi kesempatan belajar tersebut disediakan untuk Asia, Australia, Malaysia, Singapura, China, Thailand, dan negara-negara Asia lainnya (termasuk Indonesia)[3]. Bentuk lain terjadinya aliran manusia di dunia pendidikan tinggi adalah migrasi dan *brain-drain* para hasil didik, yang mencari pekerjaan di negara lain. Sebelum tahun 1991, hampir 24% dari tenaga kerja perminyakan (sebagian besar lulusan perguruan tinggi) di Negara-Negara Teluk hanya berasal dari Jordan, Mesir, Irak, Palestinia, dan Yaman[4].

Aliran teknologi komunikasi dan informasi yang berlangsung di akhir abad 20 telah memungkinkan berkelanjutannya proses pendidikan. Pada dasarnya aliran teknologi dan informasi tersebut dapat menawarkan program pendidikan yang bersifat[5]:

1. *outreach* dalam arti memberi peluang pendidikan bagi sejumlah besar penduduk, dalam beberapa hal bersifat simultan;

---

[2] Mc Ginn, N.F. 1995. *Ibids.* Hal. 77.
[3] Ping, C.J. 1998. Education Imperatives for a New Era. Dalam *Graduate Prospects in a Changing Society, A. H. Ronning and Mary-Louise Kearney, eds.* UNESCO Publishing. Hal. 77-96.
[4] Bubtana,A. 1998. Higher Education and Graduate Employment in Arab States: a Regional Perpective. Dalam *Graduate Prospects in a Changing Society, A. H. Ronning and Mary-Louise Kearney, eds.* UNESCO Publishing. Hal.119-133.

[5] Hancock, A. 1998. Contemporary Information and Communication Technologies and Education. Dalam *Education for the Twenty-First Century, J. Delors, as Chairman of the Commission report*. UNESCO Publishing. Hal. 299-316.

2. *economics of scale* sebagai konsekuensi dari *outreach,* sehingga sering disalah artikan bahwa teknologi pendidikan jarak jauh lebih murah dari pada pendidikan tradisional;
3. *richness of illustration and visualization*;
4. *individualization,* terutama perkembangan yang terakhir dari penyebar-luasan kaset video, *compact discs,* dan pemakaian bahan ajar terkomputerisasi;
5. *simulation,* untuk keadaan kemudian, dan
6. *outlet of creativity,* terutama untuk para artis dan penulis.

Aliran modal dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berbentuk kerjasama penyelenggaraan antar berbagai negara (seperti *twinning program*), pembukaan cabang perguruan tinggi mancanegara (di Indonesia tidak diperbolehkan), kerjasama riset, pemberian beasiswa kerjasama antar negara dan sebagainya. Suatu hal yang menarik dari pemberian beasiswa kepada 100.000 mahasiswa asing oleh pemerintah Jepang di tahun 2000 adalah salah satu tujuannya untuk mengembangkan masyarakat yang dapat menerima kenyataan berbagai kebudayaan sebagai suatu kebudayaan baru[6]. Inilah salah wujud nyata dari aliran citra dan gagasan dalam globalisasi pendidikan tinggi.

## Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Di era Globalisasi

Adanya aliran manusia, informasi, teknologi, modal dan citra serta gagasan sebagai fenomena globalisasi yang telah dijelaskan, tentu saja akan mengubah bentuk penyelenggaraan pendidikan di masa datang. Oleh karenanya di waktu 5-10 tahun yang akan datang perguruan tinggi diharapkan dapat mengantisipasi berbagai tuntutan berikut.

Pertama, perguruan tinggi harus mampu untuk mengantisipasi kehidupan dalam abad XXI ditandai oleh sifat ketidakpastian yang tinggi dan paradoksial

---

[6] Ping, C.J. 1998. *Ibids.*

seperti yang dinyatakan oleh Gibson (1997)[7]. Kehidupan ketidakpastian akan membawa pemikiran untuk mengambil keputusan atas dasar *the road stop here, new times call for new organizations, and where do we go next.* Kehidupan paradoksial ditandai oleh adanya kehidupan dalam jaringan kerjasama sambil berkompetisi[8]. Kerjasama sambil saling berkompetisi akan terjalin bila antara mitra saling berada pada pusat kompetensi, saling memperoleh manfaat dan juga saling terhormat.

Ke dua, perguruan tinggi harus mampu menjamin hasil didiknya di berbagai bidang profesi untuk memperoleh sertifikat profesi sebagai syarat memperoleh hak bekerja sesuai dengan kompetensi kepakaran yang dipelajarinya di perguruan tinggi. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi persaingan tenaga kerja yang mengglobal, yang masuk bersama penanaman modal asing (wujud aliran manusia dan modal) sebagai konsekuensi diberlakukannya perjanjian ASEAN-AFTA (mulai tahun 2002), WTO-GATT dan APEC (mulai tahun 2010).

Ke tiga, perguruan tinggi harus mampu menyiapkan hasil didik yang kompetensinya dinilai tidak hanya atas dasar penguasan pengetahuan dan ketrampilan, tetapi juga penguasaan sikap dan semangat kerja (*attitude*), kemampuan komunikasi, *interpersonal*, kepemimpinan, kerjasama tim, analisis permasalah dan sintesis pemecahan masalah, disiplin, teknologi informasi/ pemanfaatan komputer, fleksibilitas kerja, mampu mengelola kekaburan masalah, dapat bekerja pada berbagai kultur yang berbeda, pemahaman globalisasi, terlatih dalam etika kerja, serta menguasai bahasa asing sebagai bahasa utama ke dua[9]. Bahkan di Indonesia, hasil peneltian yang dilakukan oleh Depnaker-JICA, 1996, telah memperoleh data yang menunjukkan bahwa persyaratan tenaga kerja untuk bidang teknik (*engineering*) dan pertanian

---

[7] Gibson, R. 1997. Rethinking Bussiness. Dalam *R. Gibson ed.: Rethinking the Future.* Nicholas Brealey, London. Hal. 1-14.
[8] Naisbitt, J. 1997. From Nation States to Networks. Dalam *R. Gibson, ed.: Rethinking the Future.* Nicholas Brealey Publishing, London. Hal. 213-226.

(*agriculture*) adalah: 38% sikap dan semangat kerja, 27% pengalaman kerja atau pengenalan pekerjaan, 23% pengetahuan, 10% mutu dari perguruan tinggi, dan 2% rekomendasi[10].

Ke empat, perguruan tinggi diharapkan dapat menyelenggarakan program yang lebih humanis[11,12,13]. Makna humanis dalam hal ini memberi peluang yang lebih besar bagi anggota masyarakat untuk dapat memperoleh manfaat dari penyelenggaraan pendidikan, jaminan mutu pendidikan dan kegayutan kebutuhan masyarakat, menjawab pertanyaan terhadap persamaan hak, pemenuhan perspektif internasional dan matranya, biaya pendidikan yang sepadan. Untuk maksud ini kurikulum inti (*core curriculum*) berada dalam suatu situasi di mana sasaran penguasaan teknologi menjadi bagian dari kebudayaan, berikut dengan implikasinya sebagai bekal dasar kompetensi yang diperlukan seseorang untuk menemukan kemampuan makna diri dalam berkehidupan (*cultivating student's ability to pursue one's own end*) dan juga menempatkan diri sebagai warga masyarakat yang bersifat pluralistis.

Ke lima, kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan program studi harus dapat menjaga keserasian antara program yang diselenggarakan dengan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan cara meniadakan ketidakterpautan (*incoherence*) dan menghindarkan beban berlebihan (*overload*) proses pembelajaran, tetapi secara umum dapat mencirikan tugas khusus dan misi yang diembannya untuk setiap jenjang pendidikan.

---

[9] Hasil analisis Robertson, 1998, dalam *Subject Review Handbook, October 1988 to September 2000. The Quality Asurance Agency for Higher Education, No. 4, October 1998.*

[10] Studi Depnaker-JICA tentang *the Study of Engineering Manpower Development Planning in the Republic of Indonesia, 1996.* Proposal Program Pendidikan Profesi Insinyur Tahun Anggaran 2000, Ditjen Dikti, Depdikbud, 1999.

[11] Papadopoulos, G.S. 1998. Lerning for the Twenty-First Century: Issue. Dalam *Education for the Twenty-First Century, J. Delors, as Chairman of the Commission report*. UNESCO Publishing. Hal. 23-46.

[12] Gros, F. 1998. Opening New Doors in Science Education. Dalam *Education for the Twenty-First Century, J. Delors, as Chairman of the Commission report*. UNESCO Publishing. Hal. 262-298.

[13] Monbusho, 1998. *A Vision for Universities in the 21st Century and Reform Measures.* University Coucil, October 26, 1998.

Hal ke enam, penyelenggaraan pendidikan tinggi diharapkan mampu menampung politisasi pendidikan[14], kebutuhan belajar sepanjang umur (*long-life education*)[15], dan internasionalisasi pendidikan tinggi dalam makna *reconvergent phase of education*[16]. Politisasi di bidang pendidikan umumnya, dan pendidikan tinggi khususnya terjadi oleh karena masyarakat menyadari bahwa pendidikan merupakan jembatan untuk kemakmuran ekonomis di masa datang, pilihan piranti untuk mengatasi pengangguran, penggerak di belakang teknologi dan ilmu maju, prasyarat vitalitas kebudayaan untuk meningkatkan kenyamanan kehidupan masyarakat, pelopor kemajuan sosial dan kesamaan, pengaman nilai-nilai demokratis, dan paspor keberhasilan seseorang. Bentuk dari politisasi penyelenggaraan pendidikan antara lain adalah akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya oleh pemerintah dan masyarakat yang terlibat, pengurangan pembiayaan oleh pemerintah, yang bila tidak terkendali berpotensi memperlemah penyelenggaraan pendidikan karena adanya konflik pengutamaan objektif program di satu kepentingan, sedangkan di sisi lain adanya keinginan untuk penyelenggaraan program secara simultan[17].

**Pengelolaan untuk Mencapai Misi Pendidikan Tinggi**

Untuk dapat mencapai misi yang diharapkan dalam mengantisipasi globalisasi kehidupan, perguruan tinggi dianggap sebagai sistem produksi jasa layanan. Pengelolaan perguruan tinggi kinerjanya dapat dinilai dengan memakai kriteria ISO. Seandainya akan dipakai ISO 9000, sistem produksi perguruan tinggi dapat dinilai dengan tolok ukur: (i) mutu kepuasan dan kepercayaan layanan, (ii) mutu hasil didik (produk), dan (iii) mutu pengelolaan proses pembelajaran. Mutu tuntutan penyelenggaraan perguruan tinggi berdasarkan

---

[14] Papadopulus,G.S. 1998. *Ibids.*
[15] Belanger, P. 1998. Learning Societies in the Making. Dalam *Education for the Twenty-First Century, J. Delors, as Chairman of the Commission report*. UNESCO Publishing. Hal. 262-298.
[16] Chitoran, D. and Dias, M.A.R. 1998. The Relevance of International Co-operation in Higher Education for Graduate Employment. Dalam *Graduate Prospects in a Changing Society, A. H. Ronning and Mary-Louise Kearney, eds.* UNESCO Publishing. Hal. 63-76.
[17] Papadopulus,G.S. 1998. *Ibids.*

kriteria ISO akan dicapai dengan rambu paradigma penyelenggaraan pendidikan tinggi tinggi dalam KPPT-JP 1996-2005 yang terdiri dari: (i) otonomi, (ii) mutu pendidikan, (iii) akuntabilitas, (iv) evaluasi diri, dan (v) akreditisasi. Kalau paradigma penyelenggaraan pendidikan tinggi KPPT-JP 1996-2005 dijadikan elemen matrik sasaran pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi, maka matrik tersebut secara lengkap ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran pengelolaan perguruan tinggi atas dasar rambu-rambu paradigma pengelolaan pendidikan tinggi dalam KPPT-JP 1996-2005.

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">Kriteria mutu pengelolaan ISO 9000</td></tr>
<tr><td></td><td>Mutu layanan jasa</td><td>Mutu hasil didik</td><td>Mutu manajemen</td></tr>
<tr><td>Mampu mengantisipasi ketidak pastian dana dan paradok kerjasama.</td><td>Program yang lentur yang berorientasi minat masyarakat.</td><td>----</td><td>Otonomi bersandar pada banyak sumber dana dan jaringan kerjasama kelembagaan yang luas serta kuat.</td></tr>
<tr><td>Mampu bersaing nasional & global</td><td rowspan="2">• Tepat waktu pendidikan.<br>• Jaminan kepastian keberhasilan pendidikan.<br>• Atmosfir akademik yang mendukung.</td><td rowspan="2">Kompetensi pengetahuan dan sikap yang tersertifikasi, dan kompetitif secara nasional maupun global.</td><td>Efisien, akuntabel, disertai evaluasi diri minimum persyaratan pembatas.</td></tr>
<tr><td>Mampu menyiapkan hasil didik yang kompeten dalam ilmu dan sikap</td><td>Program terencana dan terfasilitasi dengan baik.</td></tr>
<tr><td>Program yang humanis.</td><td>Tidak adanya diskriminasi layanan jasa pendidikan.</td><td>Fleksibilitas hasil didik untuk pindah minat pendidikan dalam long-life education proses.</td><td>Satuan biaya pendidikan kompetitif, berbagai fasilitas kemudahan studi</td></tr>
<tr><td>Program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.</td><td>Otonomi penyelenggaraan program.</td><td>Akreditisasi penyelenggaraan program.</td><td rowspan="2">Otonomi penyelenggaraan, fleksibel, akuntabel, dalam jaringan kerjasama penyelenggaraan pendidikan secara nasional maupun internasional.</td></tr>
<tr><td>Mampu mengadopsi politisasi pendidikan</td><td>Kompetitif dalam kemudahan layanan dan kepercayaan penyelenggaraan.</td><td>Kemampuan membentuk jaringan kerjasama, dengan dikenal prestasi mutu hasil didik.</td></tr>
</table>

Meskipun elemen-elemen matrik dan cara penyelenggaraan untuk mencapainya telah tertentu, tetapi dalam pengelolaan perguruan tinggi tidak dapat digenerali-sasi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perguruan tinggi.

**Rambu-Rambu Pengelolaan**

Rambu-rambu yang dipakai untuk mengelola dan mengembangkan perpustakaan mencakup rambu-rambu tentang kepegawaian pustakawan dan juga rambu-rambu pembiayaan pengelolaan perpustakaan. Salah satu rambu untuk pustakawanan yang tercantum dalam UU No. 2/1989 dan PP No. 60/1999 telah diuraikan sebelumnya. Rambu-rambu pustakawan yang berkaitan dengan statusnya sebagai PNS juga berlaku untuk mereka yang megelola Perguruan Tinggi Negeri.

Untuk pengelolaan pendanaan operasional dan pengembangan dapat mengacu pada UU No. 2/1989 yang di dalamnya mencantumkan tentang peluang yang luas bagi masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional (Ps. 47 ayat (1)), serta PP No. 60/1999 Ps. 114, Ps. 115 dan Ps. 116 tentang pembiayaan dan cara pertanggungjawaban penggunaan dana. Dalam bentuk program khusus, pengembangan perpustakaan PTN dan PTS dapat diperoleh dari pemerintah melalui alokasi dana yang dikompetisikan lewat DUE, QUE, maupun penelitian unggulan (URGE, RUT, dll.).

**Beberapa Bentuk Perbaikan Pengelolaan Perpustakaan Di perguruan Tinggi dalam Mengantisipasi Globalisasi.**

1. **Merubah dari Sistem Birokrasi Pemerintahan Ke organisasi Tim Kerja (*Work Team*) dengan Orientasi Pemberian Jasa Layanan (*Service Orientation*).**

Organisasi tim kerja akhir-akhir ini mulai berkembang di Amerika Serikat dan juga di negara-negara maju lainnya[18] dalam suatu organisasi yang tugas-tugasnya selalu berkembang dengan cepat sehingga tidak mungkin diselesaikan secara terpusat. Organisasi didukung oleh tenaga-tenaga profesional berkompeten tinggi sebagaimana organisasi perguruan tinggi yang melibatkan dosen dan pustakawan sebagai pimpinan maupun anggotanya. Asas yang dipakai oleh organisasi kerja sangat sederhana terdiri atas 10 butir, yaitu:

(i) adanya tujuan (objektif bersama yang jelas);
(ii) adanya kepemimpinan yang bersifat pemberdayaan klien dan warga lainnya (utamanya anggota tim kerja);
(iii) adanya interaksi dan keterlibatan anggota tim kerja di setiap kegiatan yang dilaksanakan;
(iv) terpeliharanya kepuasan warga tim kerja (dalam hal ini sivitas akademika perguruan tinggi) dalam bekerjasama;
(v) komunikasi secara terbuka;
(vi) adanya kekuatan dari setiap warga tim kerja (kelompok warga tim kerja) dalam mengambil keputusan;
(vii) adanya perhatian dalam setiap proses dan makna kegiatan yang dilakukan;
(viii) iklim (kebudayaan) untuk saling mempercayai;
(ix) menghargai adanya perbedaan pendapat;
(x) penyelesaian perbedaan pendapat yang bersifat konstruktif (*win-win solution* atas dasar *social-energy*).

Kalau dalam organisasi tim kerja diinginkan adanya pusat kendali yang kuat, efisien, dan ramping, dengan anggota-anggota yang berkebabasan untuk

---

[18] Rees, F. 1991. *How to Lead Work Teams.* Pfeiffer & Company, San Diego, California. 161 hal.

mengampil keputusan tetapi taat pada kesepakatan, maka terwujud apa yang dinamakan asas organisasi donat terbalik Handy[19].

Prinsip pengembangan organisasi tim kerja tidak bertentangan dengan PP No. 60/1999 ataupun PP No. 61/1999, bahkan merupakan wujud cara implementasinya. Sebaliknya, organisasi tim kerja agak berlawanan dengan organisasi birokrasi pemerintahan yang lebih bersifat terpusat dan struktural. Kalau organisasi tim kerja akan diarahkan pada pemberian jasa layanan perpustakaan, maka perubahan sistem kerja ini selain menuju ke tercapainya 10 asas operasional juga harus berorintasi pada asas kinerja yang secara kualitatif terpercaya, kenyamanan, kepastian perolehan serta kesamaan perlakuan. Untuk mencapai tujuan kinerja pengelolaan pelayanan sikap "tampil diri yang menarik" dan "bersahabat saling menghormati" bagi pustakawan sangat dominan disamping sikap profesional tentang pengetahuan keperpustakaannya.

Sistem PNS birakratis struktural kurang dapat mengakomodasi pola pengelolaam berorientasi pelayanan apalagi dalam suatu organisasi tim kerja. Seperti diketahui sistem PNS belum dapat mengakomodasi penghargaan terhadap prestasi kerja maupun pelanggaran kesepakatan kerja, dengan jaminan kesejahteraan seumur hidup. Osborn dan Gaebler[20] memberikan kritik terhadap birokrasi pemerintahan sebagai berikut:

> " Bentuk pemerintahan yang berkembang selama era industri, dengan birokrasi yang lamban dan terpusat, pemenuhan terhadap ketentuan dan peraturan, serta rantai hirarki komando, tidak lagi berjalan dengan baik".

Di dalam kehidupan PNS (dalam hal ini perguruan tinggi), model pembangunan terpusat melalui birokrasi pemerintahan selama PJP I telah melahirkan masayarakat PNS perguruan tinggi yang bersifat kliente, bukan lagi sebagai "warganegara". Masyarakat ini para anggotanya hanya menunggu alokasi

---

[19] Handy, C. 1997. Findings Sense in Uncertainty. Dalam *R. Gibson, ed.: Rethinking the Future.* Nicholas Brealey Publishing, London. Hal. 16-33.

dana, dan fasilitas dari pusat, petunjuk dan atau pengarahan, yang apabila diberi akan membentuk "kerajaan-kerajaan pemilikan kecil" tanpa disertai adanya rasa tanggungjawab menjaga keberlanjutannya.

## 2. Cakupan Lingkup Kerja dan Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Cakupan lingkup kerja dan informasi perpustakaan dapat dikembangkan dari dari persyaratan perguruan tinggi untuk mengantisipasi globalisasi dan cakupan Tri Dharma yang berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan lingkup kerja dan informasi perpustakaan dapat ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Cakupan lingkup kerja dan informasi perpustakaan

| Persyaratan perguruan tinggi | Informasi Tri Dharma Perguruan Tinggi | | |
|---|---|---|---|
| | Pendidikan | Penelitian | Pengabdian kepada masyarakat |
| Mampu menganti-sipasi ketidakpastian dan paradoksial kehidupan. | • Wirausaha jasa layanan informasi sehingga mampu mandiri untuk pelayanan di dalam maupun dengan luarperguruan tinggi.<br>• Menjalin dan berperan aktif dalam jaringan peyedia informasi maupun dokumen ilmiah. | | |
| Mampu bersaing nasional & global | • Mendokumentasikan kurikulum, silabi dan profil tenaga pengajar.<br>• Tukar menukar data informasi terdokumentasi materi ajar dan proses pembelajaran.<br>• Menyediakan informasi *state of the art* ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. | • Menyediakan data informasi mutakhir untuk pendukung penelitian.<br>• Menyediakan data informasi tentang perlindungan dan hak-hak milik akademik.<br>• Mendokumentasikan hasil-hasil penelitian. | • Menyediakan dan tukar menukar data lapangan kerja dan persya-ratan profesi.<br>• Mendokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. |
| Mampu menyiapkan hasil didik yang kompeten dalam ilmu dan sikap.<br>Program yang humanis. | Menyediakan informasi dan mengembangkan *networking* pengaksesan data pengetahuan tentang: berbagai etika profesi, proses pembelajaran yang mendorong ke arah berkembangnya jiwa kewirausahaan melalui *a method of inquiry.* | | |
| Program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. | Mendokumentasi dan menyediakan informasi tentang kesediaan lapangan kerja dan persyaratan kompetensi profesi yang berkembang di masyarakat, baik nasional maupun internasional. | | |
| Mampu mengadopsi politisasi pendidikan. | Penyelenggaraan perpustakaan yang terakuntabilitas sebagai bagian penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terakuntabilitas. | | |

[20] Osborn, D. dan gaebler, T. 1997. Mewirausahakan Birokrasi. *Terjemahan A. Rosyid: Reinventing Government.* PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta..

### 3. Mengembangkan Kerjasama dengan Institusi Luar

Mengembangkan kerjasama dengan fihak luar perguruan tinggi dalam upaya mengelola perpustakaan menjadi produktif harus dilandasi oleh analisis yang cermat dari makna kerjasama jaringan kerja seperti yang dikemukakan oleh Naisbitt[21] yaitu kerjasama dalam berkompetisi. Oleh karena itu sebelum bekerja sama perlu dirumuskan secara jelas hal-hal utama berikut:

(i) mengapa perpustakaan perguruan tinggi diajak atau dapat bekerjasama, untuk diarahkan pada jawaban apa manfaat yang akan diperoleh dan manfaat yang dapat diberikan kepada mitra kerjasama;

(ii) adakah manfaat ketenaran perpustakaan dapat mendorong ketenaran lembaga perguruan tinggi sebagai bagian promosi perguruan tinggi secara keseluruhan;

(iii) dalam keadaan yang ketidak pastian, bagaimana menjaga keberlanjutan kegiatan yang dibangun atas dasar kerjasama sehingga tidak menimbulkan akibat negatif sebagai konsekuensi terputusnya kerjasasama yang mungkin terjadi sewaktu-waktu; dan

(iv) berapa kapasitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mencapai *optimal management size* yang mekar melalui kerjasama.

Fenomena yang dijumpai dalam kehidupan perguruan tinggi di Indonesia adalah kerjasama yang sifatnya belum seimbang dengan perguruan tinggi lebih mengharapkan sesuatu dari luar sehingga sifatnya menjadi ketergantungan atau keterikatan yang rapuh. Perguruan tinggi belum mampu bertindak pro-aktif terhadap mitra kerjanya dalam menyatakan ini yang dapat kami berikan kepada mitra dan imbalan apa yang dapat mitra berikan kepada perguruan tinggi. Bahkan karena sifat ketergantungan perguruan tinggi terhadap mitra sangat besar, maka mendorong menjadi perguruan tinggi

---

[21] Naisbitt, J. 1997. *Ibids.*

yang berjiwa kliente, seperti halnya keadaan sekarang dalam hubungan PTN-Pemerintah.

**4. Mengembangkan Teknologi yang Sepadan**

Teknologi yang dimaksud terdiri atas produk *technoware, humanware, orgaware,* dan *infoware* yang masing-masing dalam bentuk keberadaan berkesepadanan. Di dalam perkembangan teknologi informasi *cyber* sekarang, ada kecenderungan bahwa dokumen elektronik cenderung makin bertambah peranannanya dalam tukar menukar informasi. Masalah yang dihadapi adalah, teknologi informasi elektronik dalam jaringan *cyber* tidak dapat diakses secara merata tergantung pada ketersediaan *humanware* dan juga *orgaware.* Sebagai contoh adalah fasilitas telepon di beberapa wilayah yang masih sangat terbatas, dan katerbatasan kemampuan mengoperasikan komputer ataupun menyediakan fasilitas *technoware* lain. Oleh karena itu dalam pengembangan perpustakaan yang akan mencakup teknologi *cyber* maka diperlukan perencanaan yang cermat supaya benar-benar dapat efektif dan efisien pemanfaatannya.

**Penutup**

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa pengembangan perpustakaan perguruan tinggi merupakan salah satu syarat utama agar pendidikan tinggi dapat bersaing secara global dalam mengembangkan misi Tri Dharma. Namun demikian karena beberapa perguruan tinggi masih bersifat dalam tahapan *survival,* maka maksud pemerintah tersebut sering kurang dapat ditanggapi secara semestinya. Ketertinggalan perpustakaan sebagai pusat layanan infromasi akademik diperparah oleh adanya sikap pustakawan yang mengelola pelayanan jasa informasi tidak berorientasi pada *service oriented management,* dan iklim akademik yang tidak kondusif untuk mendorong perkembangan fungsi perpustakaan.

"Keterlantaran" pustakawan yang umum terjadi di perguruan tinggi bila dirunut akhirnya akan bermuara pada dua hal yang disebutkan terakhir.

Jakarta, 26 Maret 2000

Direktur